



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pegawai Negeri Sipil.....	32
F. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	42
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statutory Approach).....	44
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).....	44
B. Jenis Data.....	45
1. Data Primer.....	45
2. Data Sekunder.....	46
a. Bahan Hukum Primer.....	46
b. Bahan Hukum Sekunder.....	49
c. Bahan Hukum Tersier.....	49
3. Alat Pengumpulan Data.....	49
4. Pengolahan dan Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.....	52
B. Mekanisme penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai terpidana kasus korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.....	55
1. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan PP Disiplin PNS.....	57
2. Persoalan Dalam PP Disiplin PNS.....	66
a. Dasar Pemanggilan PNS Yang Diduga Terkait Kasus Korupsi.....	66
b. Kriteria Pemanggilan PNS Yang Diduga Terkait Kasus Korupsi.....	68
c. Potensi Kerugian Keuangan Negara.....	71
C. Mekanisme penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai terpidana kasus korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.....	73
1. Mekanisme Penegakan Disiplin PNS Menurut PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.....	73



a.	Disiplin.....	74
b.	Pemberhentian.....	75
2.	Persoalan Dalam PP Manajemen PNS.....	79
a.	Tidak Ada Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Sebagaimana dalam PP Disiplin PNS.....	79
b.	Perbedaan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat Antara PP Disiplin PNS dengan PP Manajemen PNS.....	82
c.	Perbedaan Pemberhentian Sementara dengan Pembebasan Sementara..	85
d.	Perbedaan Terkait Batas Waktu Berlakunya Pemberhentian.....	93
e.	Munculnya Surat Keputusan Bersama Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.....	94
D.	Asas Kepastian Hukum Pada Produk Hukum Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Terkait Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berstatus Sebagai Terpidana Kasus Korupsi.....	100
BAB V PENUTUP		106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		109